



PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DI SMA NEGERI 4 KOTA JAMBI UNTUK MENGHADAPI PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020

A Zarkasi¹, Dimas Rizal²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Jambi

E-mail : dimas.rizal@unja.ac.id

Abstrak

Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik dimulai dari input, proses dan output. Sehingga, keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan politik merupakan prasyarat mutlak dalam sebuah tatanan negara yang demokratis. Lebih dari pada itu, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan berpengaruh terhadap penerimaan dan pengakuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan gubernur berdampak pada pengakuan masyarakat terhadap calon terpilih. Pada pemilihan gubernur tahun 2020 pemilih pemula mempunyai andil yang cukup besar untuk menentukan calon pemimpin lima tahun kedepan. Hal ini dikarenakan pemilih pemula merupakan pemilih rasional yang memilih kandidat sesuai dengan latar belakang atau CV kandidat. Sehingga menuntut setiap calon untuk membuat penawaran visi dan misi kepada pemilih dengan penuh pertimbangan. Hal ini bisa dikatakan sebagai kontrol masyarakat terhadap pemimpinnya.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan gubernur, Pemilih Pemula

Abstract

Political participation is the active involvement of the community in political life starting from the input, process and output. Thus, public participation in political life is an absolute prerequisite for a democratic state order. More than that, community involvement in elections affects acceptance and recognition in running the wheels of government. The election of governors has an impact on public recognition of the elected candidates. In the 2020 gubernatorial election, first-time voters have a large enough share to determine the future leaders in the next five years. This is because new voters are rational voters who choose candidates according to the candidate's background or CV. So that requires each candidate to make a vision and mission offer to voters with full consideration. This can be said as community control of their leaders.

Keywords: Political Participation, Governor Election, Beginner Voters.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang menganut sistem demokrasi. Salah satu indikator perkembangan demokrasi yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik atau dikenal dengan partisipasi politik. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik menjadi penting untuk menentukan arah perkembangan negara dalam membentuk pemerintahan demokrasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (Samuel Huntington, 1994). Partisipasi politik juga merupakan pemenuhan hak politik warga negara. Sehingga, keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik merupakan prasyarat mutlak dalam sebuah tatanan negara yang demokratis.

Dalam proses rekrutmen politik akan semakin tidak kondusif apabila praktek money politic terjadi dalam proses pemilihan pejabat publik. Hal ini yang harus dihindari untuk mencegah terpilihnya pejabat publik yang tidak berkualitas dan tidak berkapabilitas menjadi kepala daerah. Dalam hal ini, partisipasi yang diharapkan yaitu proses transformasi kepentingan publik dalam ranah struktur politik, memilih dan dipilih sebenarnya merupakan hal yang sama, yaitu berpartisipasi dalam dunia politik. Pada umumnya, partisipasi politik masih dianggap oleh masyarakat sebagai keikutsertaan dalam kegiatan pemilihan umum yaitu mencoblos di tempat pemungutan suara waktu pemilihan umum.

Lebih dari pada itu, keterlibatan politik berpengaruh kepada penerimaan dan pengakuan kepada jalannya roda pemerintahan. Pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, warga negara dapat menentukan calon pemimpin daerahnya tanpa adanya intimidasi, politik kekerasan, maupun tekanan dalam birokrasi. Hal ini disimpulkan pemilihan kepala daerah secara serentak adalah waktu yang tepat untuk munculnya berbagai alternatif pemilih yang menjadi faktor dalam melakukan suatu kegiatan atau perilaku politik dari masyarakat.

Dalam pemilihan umum salah satu pemilih yang mempunyai peran yang cukup besar adalah pemilih pemula. Hal ini dikarenakan pemilih pemula merupakan pemilih yang rasional, maksudnya pemilih yang melihat latar belakang calon serta tawaran visi dan misi yang akan ditawarkan kepada mereka. Sehingga pemilih pemula sangat diharapkan tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur provinsi jambi tahun 2020 tinggi.

Pemilihan umum secara serentak di Indonesia pada tahun 2020, salah satunya adalah pemilihan gubernur Provinsi Jambi. Hal ini menjadi landasan peneliti untuk mengangkat tema Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula di SMA Negeri 4 Kota Jambi Untuk Menghadapi Pemilihan Gubernur Tahun 2020.

2. BAHAN DAN METODE PENGABDIAN

Adapun fokus penelitian ini adalah pemilih pemula di SMA Negeri 4 Kota Jambi, serta perwakilan dari SMA sekitar yang berada di kota Jambi. Ini diharapkan supaya perwakilan dari SMA yang lain menjadi agen penyampai kepada siswa-siswa di sekolah masing-masing. Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan oleh peneliti dalam memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula pada pemilihan gubernur tahun 2020, meliputi:

a. Tahapan Pertama

Tim melakukan survei lokasi PPM untuk mengidentifikasi persoalan mitra dengan melakukan diskusi dengan pihak mitra. Hal ini digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

b. Tahapan Kedua

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan penyuluhan kepada pemilih pemula dengan tema Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula di SMA Negeri 4 Kota Jambi Untuk Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur Tahun 2020. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020. Tahapan kedua ini meliputi Pemaparan Solusi melalui Materi yang relevan dengan permasalahan mitra, Memaparkan Materi dan contoh dengan menayangkan slide/powerpoint, serta Tanya jawab/diskusi.

c. Tahapan Ketiga

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring evaluasi terhadap mitra. Pada tahapan ini diharapkan permasalahan yang ditemui dilapangan antar mitra dapat teratasi. Dalam hal ini tim pengabdian akan melakukan pendampingan kepada mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari kegiatan PKM ini adalah: 1) Meningkatnya pengetahuan generasi muda (pemilih pemula) terhadap politik dibandingkan sebelum adanya sosialisasi pendidikan politik di SMA N 4 Kota Jambi; 2) Generasi muda (Pemilih Pemula) khususnya Siswa SMAN 4 Kota Jambi mengetahui mekanisme dalam pemilu yang diadakan di Kota Jambi; 3). SMAN 4 Kota Jambi sebagai Generasi muda (Pemilih Pemula) dapat bersikap kritis terhadap berita politik, calon legislatif dan pemimpin daerah atau pusat, 4). Generasi muda khususnya Siswa SMAN 4 Kota Jambi dapat berpartisipasi dalam pileg atau pilkada 2020.

1. Diskusi Awal Tim PKM Bersama pihak SMAN 4 Kota Jambi

Adapun peserta dari diskusi awal ini terdiri dari Tim PKM bersama Pihak SMAN 4 Kota Jambi. Diskusi awal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran singkat tentang tingkat pemahaman dan kepedulian Siswa-Siswi SMAN 4 kota jambi terhadap pendidikan politik. Selain

itu, Tim PKM dapat mengetahui pandangan, opini, persepsi dan sikap siswa-siswi SMAN 4 kota Jambi terhadap dinamika politik di Kota Jambi. Adapun hasil yang diperoleh dari diskusi awal ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan materi yang digunakan pada sesi sosialisasi pendidikan politik. Sehingga, materi yang akan disampaikan dalam acara sosialisasi ini bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Dari hasil diskusi awal ini juga tim PKM bisa mengetahui ada beberapa kendala mengapa siswa-siswi SMAN 4 kota jambi masih belum maksimal dalam partisipasi politik, hal itu dikarenakan salah satunya adalah kurangnya sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula khususnya siswa-siswi SMAN 4 Kota Jambi.

Gambar 1: SMAN 4 Kota Jambi



2. Partisipasi Politik.

Pentingnya materi tentang partisipasi politik ini disampaikan adalah berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa-siswa. Dalam penyampaian materi menyajikan berbagai sudut pandang, seperti partisipasi formal dan informal. Hasilnya menandakan bahwa para siswa sangat tidak mengetahui dan memahami pentingnya partisipasi politik. Pars berarti bagian-bagian dan capere berarti mengambil atau ikut serta. Jadi partisipasi secara bahasa dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam mengambil peran sebagai unsur dalam politik. Kemudian dalam bahasa Inggris, disebut *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Rush dan Althoff (2001:48) mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu pada berbagai macam tingkatan berpolitik.

Sementara menurut Mirriam Budiardjo (2008) bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau melalui gerakan sosial.

Bentuk partisipasi politik sendiri terbagi dalam dua jenis yaitu: partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas'ood dan Andrews (1986) yang menerangkan bahwa, partisipasi politik secara konvensional adalah pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan partisipasi politik secara non-konvensional adalah pengajuan petisi demonstrasi, konfrontasi mogok, sampai pada partisipasi yang lebih ekstrem seperti tindakan terhadap harta benda (*perusakan*, *pemboman*), tindakan kekerasan terhadap manusia (*penculikan*, *pembunuhan*, *gerilya*, *revolusi*).

3. Bentuk dan Proses Pendidikan Politik

Bentuk dan proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut Kavang (1998), terbagi atas dua jenis, yaitu: (a) Bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi dimana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus. (b) Bentuk dan proses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya).

Adapun bentuk sosialisasi politik berdasarkan jumlah peserta (*audience*) atau massa yang mengikutinya dibedakan menjadi bentuk umum dan bentuk terbatas. Bentuk umum terjadibila massa (*audience*) yang melaksanakannya tidak dibatasi jumlahnya sedangkan bentuk yang terbatas jumlahnya dibatasi untuk kalangan tertentu.

4. Pemilih Pemula

Pemilih adalah sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan keyakinan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideology tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik (Prihatmoko, 2005)

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. *Kedua*, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. *Ketiga*, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia

dengan rentang usia 17-21 tahun (Fenyapwain, 2013).

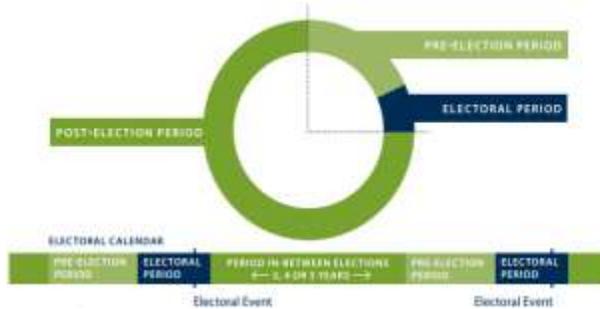
Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Sedangkan menurut Suhartono (2009:6) pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu, semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari.

5. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik

Sosialisasi pendidikan politik ini membantu individu dari para siswa-siswi SMAN 4 Kota Jambi dalam membangun kesadaran politik, apresiasi, dan pemahaman mengenai kegiatan politik. Individu termasuk pemuda yang masuk dalam proses politik menjadi sebuah tantangan yang multidimensi dan kompleks yang harus ditanamkan nilai-nilai demokrasi agar mampu membuat kualitas demokrasi menjadi lebih baik. Setting inilah yang membuat tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa penting untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula khususnya siswa-siswi SMAN 4 Kota Jambi agar mempunyai nilai-nilai kritis, positif dan komprehensif dalam berpartisipasi politik.

Gambar 2. Siklus Pemilihan Umum



Sumber: UNDP dan NDI 2011

Gambar diatas merupakan siklus pemilihan umum yang akan terus berulang. *Stage* pertama adalah periode sebelum pemilihan (*pre election period*), dimana “segala cara” baik dalam bentuk kampanye maupun tindakan politis akan dilakukan oleh para kandidat untuk mendapatkan dan mendukung suara rakyat. *Stage kedua* adalah periode pemilihan (*election period*), yang menjadi momentum bagi rakyat untuk menentukan pilihannya dihari pemungutan suara. Vote yang diberikan kepada calon kandidat dipengaruhi oleh preferensi pemilih berdasarkan identitas politik dengan nilai-nilai yang dianut, selain itu dipengaruhi oleh

literasi politik dan pilihan rasional yang didapat selama periode sebelum pemilih (*pre election period*). *Stage ketiga* adalah periode setelah pemilihan umum (*Post elected period*). Periode ini menjadi masa pembuktian yang dilakukan oleh kandidat yang dipercaya untuk menjadi governing elit oleh para pemilih.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada periode dimana pembentukan preferensi politik para pemilih pemula terutama pemilih muda dari siswa-siswi SMAN 4 Kota Jambi, yaitu pada periode sebelum pemilihan. Periode sebelum pemilihan atau *pre election period* menjadi momentum untuk mendorong para pemilih pemula atau generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Dalam beberpa literatur dan kajian-kajian tentang kepemiluan, pemilih pemula merupakan salah satu tujuan yang sangat strategis yang akan diminati oleh para caon kandidat untuk dijadikan sebagai basis suara mereka. Maka dari itu pemilih Pemula harus diberikan pendidikan tentang politik agar memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni terhadap poltik dan demokrasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan tema “Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih pemula di SMAN 4 Kota Jambi dalam menghadapi pemilihan gubernur 2020”.

Gambar 3:
Para Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik



Selain materi tentang politik, peserta sosialisasi pendidikan politik juga diberikan pelatihan dalam Pembuatan media sosial. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi ilmu Politik Universitas Jambi mencoba untuk memberikan pendidikan politik melalui media sosial seperti facebook, twitter dan instagram. Perkembangan informasi dan teknologi tentunya dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan politik kepada setiap orang, khususnya bagi pemilih pemula siswa-siswi SMAN 4 Kota Jambi .

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun hasil dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tentang pendidikan politik untuk pemilih pemula khususnya siswa-siswi SMAN 4 Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pendidikan politik dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan terhadap politik bagi pemilih pemula khususnya siswa-siswi SMAN 4 Kota Jambi. Selain itu, pendidikan politik dapat menghindarkan pemilih pemula dari praktek politik kotor yang bersifat negatif, seperti *money politic* dan kampanye hitam (*black campaign*). Serta dapat memotivasi siswa siswi SMAN 4 Kota Jambi yang sebagai pemilih pemula untuk sadar serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis. Adapun saran yang disampaikan setelah terlaksananya kegiatan PKM ini yaitu hendaknya pihak yang berkaitan dengan politik seperti KPU dan Bawaslu Kota Jambi dapat meningkatkan lagi sosialisasi pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula seperti siswa-siswi SMAN 4 Kota Jambi dan aktif mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan politik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada pihak SMAN 4 Kota jambi, Para Guru dan siswa-siswi yang sudah membantu berjalannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa juga kami ucapkan beribu Terimakasih pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas jambi khususnya pihak LPPM Universitas Jambi yang sudah memberikan dana untuk kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L. 1976. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. New York: Anchor Books.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Bandung.
- _____. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fenyapwain, M.M. (2013). Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet

Kecamatan Kakas. Journal “Acta Diurna”
Volume I. No. 1 Tahun 2013.

- Huntington, Samuel P. 1984. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta, Sangkar Pulsar.
- Michael, Rush, Althof, Philip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, Rajawali Pers
- Miles, Matthew B, dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Prihatmoko, J.J. (2005). *Pemilihan Kepala DaerahLangsung. Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Semarang: PustakaPelajar.
- Ranjabar, Jacobus. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung, Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syahrial, Sarbaini, dkk. 2011. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Suhartono. (2009). *Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada; Suatu Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus PilkadaProvinsi Banten Jawa Barat)*”, (Hasil Penelitian,Pascasarjana UPI, 2009) hal 6.
- Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. *Tentang Pemilih Pemula*.